



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Tata Negara	8720502174	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	3	7 April 2025
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi
	Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, SH., M.H., Rahmanu wijaya S.H., M.H		Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, SH., M.H.		Dr. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.

Model Pembelajaran	Case Study
---------------------------	------------

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
CPL-5	Mampu menguasai konsep dasar dan teori bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi kajian. politik, hukum, sosial, humaniora, nilai-moral Pancasila, dan Pedagogik
CPL-7	Mampu melakukan analisis dan sintesis yang berorientasi eksplanatif dan prediktif terhadap gejala-gejala sosial, politik, pendidikan, dan kewarganegaraan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK - 1	Memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbantuan TIK untuk menelusuri data/informasi dalam rangka menemukan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara ketatanegaraan
CPMK - 2	Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Tata Negara ketatanegaraan
CPMK - 3	Membuat keputusan menganalisa berbagai masalah yang berkaitan kerangka ketatanegaraan
CPMK - 4	Membuat keputusan dengan berpedoman pada konsep Hukum Tata Negara ketatanegaraan untuk menyelesaikan permasalahan yang relevan di masyarakat, bangsa dan negara.
CPMK - 5	Memiliki sikap bertanggungjawab batas pemikiran kritis berbagai masalah yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara ketatanegaraan

Matrik CPL - CPMK

	CPMK	CPL-2	CPL-5	CPL-7
CPMK-1		✓		
CPMK-2			✓	
CPMK-3				✓
CPMK-4			✓	
CPMK-5		✓		

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

	CPMK	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1		✓															
CPMK-2																	
CPMK-3																	
CPMK-4																	
CPMK-5																	

Deskripsi Singkat MK Kajian tentang asas-asas dan prinsip-prinsip ketatanegaraan menurut teori yang ada, teori kelembagaan negara, teori hubungan antar lembaga negara, teori sistem pemerintahan, dan pelaksanaannya di Indonesia melalui analisis terhadap praktik pengaturan ketatanegaraan Indonesia. Perkuliahan dilaksanakan dengan pemaparan melalui ceramah, sistem analisis, presentasi dan diskusi, tugas proyek, dan refleksi

Pustaka **Utama :**

1. Assiddiqie, Jimly. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Press : Jakarta Assiddiqie, Jimly, 2005. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta Erwin Chemerinsky. 2011. Constitutional Law, Principles and Policies, 4 th Edition. Aspen Publisher : USA Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta Joeniarto. 1986. Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bhina Aksara Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Pusat Studi Hukum UI : Jakarta Majda El Mujtad. 2005. Hak Asas Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana : Jakarta Moentiro, Josef M. 2002. Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 .Pustaka Yustisia : Jakarta MPR RI. 2002 . Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal RI : Jakarta Vile.M.J.C. 1990. Constitutionalism and the Sparation of Power . 1995. Tompson, Brian. 1997. Textbook on Constitutional and Administration Law . Edisi ke-3. Blackstone Press Ltd : London Undang Undang tentang MD3. Sekretariat Negara : Jakarta
2. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta
3. Erwin Chemerinsky. 2011. Constitutional Law, Principles and Policies, 4 th Edition. Aspen Publisher : USA
4. Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
5. Assiddiqie, Jimly. 2012. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, PT. BIP- Kelompok Gramedia, Jakarta
6. Miriam Budiarjo, 1999. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
7. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia
8. Sri Soemantri, 2006. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung
9. Kelsen Hans, 1973. General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York
10. M. Solly Lubis, 1976 Asas-Asas Hukum Tata Negara, Almunir, Bandung

Pendukung :

1. Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI : Jakarta
2. Joeniarto. 1986. Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bhina Aksara
3. Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI : Jakarta
4. Majda El Mujtad. 2005. Hak Asas Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana : Jakarta
5. Moentiro, Josef M. 2002. Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945. Pustaka Yustisia : Jakarta
6. MPR RI. 2002. Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal RI : Jakarta
7. Vile.M.J.C. 1990. Constitutionalism and the Sparation of Power. 1995.

Dosen Pengampu Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.
Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.
Dr. Wahyudi, S.Pd., M.Si. (Han).

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	<p>1. Memahami pengertian, Obyek, kedudukan dan Ruang lingkup HTN</p> <p>2. Mahasiswa mampu Hakikat Hukum Tata Negara dan Manusia sebagai mahluk sosial dan Politik</p>	<p>mampu menjelaskan objek, subjek HTN dan ruang lingkup HTN serta hakikat HTN</p>	<p>Kriteria: Baik Sedang Buruk</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>offline 2 X 30</p>	<p>Video 40</p>	<p>Materi: Hakikat HTN Pustaka: Assiddiqie, Jimly. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Press : Jakarta Assiddiqie, Jimly, 2005. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta Erwin Chemerinsky. 2011. Constitutional Law, Principles and Policies, 4 th Edition. Aspen Publisher : USA Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada : Jakaarta Joeniarto. 1986. Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bhina Aksara Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Pusat Studi Hukum UI : Jakarta Majda El Mujtad. 2005. Hak Asas Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana : Jakarta Moentiro, Josef M. 2002. Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 . Pustaka Yustisia : Jakarta MPR RI. 2002 . Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal RI : Jakarta Vile. M.J.C. 1990. Constitutionalism and the Sparation of Power . 1995. Tompson, Brian. 1997. Textbook on Constitutional and Administration Law . Edisi ke-3. Blackstone Press Ltd : London Undang Undang tentang MD3. Sekretariat Negara : Jakarta</p>	<p>5%</p>
2	<p>Memahami Asas-Asas HTN dan Hubungan kekuasaan negara</p>	<p>- Menjelaskan Asas-asas HTN dan implementasinya - Menjelaskan hubungan antara :Legislatif, eksekutif dan yudikatif serta Menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p>	<p>Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Tatap Maya Diskusi WA Group Vinesa 2 X 50</p>		<p>Materi: Asas Asas HTN Pustaka: Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta</p>	<p>5%</p>
3	<p>Memahami konsep lembaga negara secara teori dan yang diterapkan di Indonesia</p>	<p>- Mmenjelaskan pengertian lembaga negara - Menjelaskan kedudukan masing-masing lembaga negara - Menjelaskan kriteria lembaga negara Menjelaskan lembaga negara yang ada di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945</p>	<p>Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Tatap Maya Diskusi Presentasi 2 X 50</p>		<p>Materi: Lembaga Negara Pustaka: _2005. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta</p>	<p>5%</p>

4	mampu Memahami konsep kekuasaan Legislatif, eksekutif dan Yudikatif dan mengidentifikasi kedudukan dan fungsinya	· Menjelaskan teori trias politika · Menjelaskan fungsi kekuasaan legislatif · Menjelaskan fungsi kekuasaan eksekutif · Menjelaskan kekuasaan kehakiman	Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Tatap Maya Kajian Artikel dan Tanya Jawab 2 X 50		Materi: Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Pustaka: Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. <i>Pengantar Hukum Tata Negara Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI : Jakarta</i>	5%
5	Memahami konsep sistem pemerintahan secara teori dan praktek di Indonesia	- Menjelaskan sistem pemerintahan yang berlaku secara umum di dunia - Menjelaskan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sejak berdirinya negara Indonesia sampai sekarang	Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Tatap Maya Diskusi Daring Kaji Jurnal 2 X 50		Materi: Sistem Pemerintahan dan Konstitusi Pustaka: Assiddiqie, Jimly. 2012. <i>Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Press : Jakarta</i> Assiddiqie, Jimly, 2005. <i>Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta</i> Erwin Chemerinsky. 2011. <i>Constitutional Law, Principles and Policies, 4 th Edition. Aspen Publisher : USA</i> Huda, Ni'matul. 2005. <i>Hukum Tata Negara Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta</i> Joeniarto. 1986. <i>Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bhina Aksara</i> Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. <i>Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Pusat Studi Hukum UI : Jakarta</i> Majda El Mujtad. 2005. <i>Hak Asas Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana : Jakarta</i> Moentiro, Josef M. 2002. <i>Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 .Pustaka Yustisia : Jakarta</i> MPR RI. 2002 . <i>Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal RI : Jakarta</i> Vile. M.J.C. 1990. <i>Constitutionalism and the Sparation of Power . 1995. Tompson, Brian. 1997. Textbook on Constitutional and Administration Law . Edisi ke-3. Blackstone Press Ltd : London</i> Undang Undang tentang MD3. Sekretariat Negara : Jakarta	5%

6	Memahami konsep Negara Demokrasi dan Memahami pemilu menurut teori dan yang berlaku di Indonesia	Mampu memahami konsep Negara Demokrasi Menjelaskan sistem pemilu Menjelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem pemilu Menjelaskan sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Tatap MayaKaji Jurnal dan ArtikelQA melalui Whatsup Group 2 X 50		Materi: Negara Demokrasi dan Lembaga Lembaga Negara Pustaka: <i>Erwin Chemerinsky. 2011. Constitutional Law, Principles and Policies, 4 th Edition. Aspen Publisher : USA</i>	5%
7	Mahasiswa memahami konsep Jaminanan Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum ketatanegaraan serta konsep kewajiban asasi	Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar jaminan Hak Asasi manusia dan priblematikannya di IndonesiaMahasiswa mampu mengidentifikasi bagian kewajiban asasi manusia dan praktiknya di Indonesia	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Tatap MayaDiskusiAnalisa Berita dan Vldeo 2 X 50		Materi: Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Pustaka: <i>Majda El Mujtad.2005. Hak Asas Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana : Jakarta</i>	5%

8	UTS	UTS	Kriteria: UTS Bentuk Penilaian : Tes	UTS 2 X 50		Materi: Sejarah HTN, Subjek HTN dan Ruang Lingkung HTN dan Hakikat HTN di Indonesia Pustaka: Assididqie, Jimly. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Press : Jakarta Assididqie, Jimly, 2005. Format Kelembagaaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta Erwin Chemerinsky. 2011. Constitutional Law, Principles and Policies, 4 th Edition. Aspen Publisher : USA Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada : Jakaarta Joeniarto. 1986. Sejarah Ketata Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bhina Aksara Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Pusat Studi Hukum UI : Jakarta Majda El Mujtad. 2005. Hak Asas Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana : Jakarta Moentiro, Josef M. 2002. Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 .Pustaka Yustisia : Jakarta MPR RI. 2002 . Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal RI : Jakarta Vile. M.J.C. 1990. Constitutionalism and the Sparation of Power . 1995. Tompson, Brian. 1997. Textbook on Constitutional and Administration Law . Edisi ke-3. Blackstone Press Ltd : London Undang Undang tentang MD3. Sekretariat Negara : Jakarta	15%
9	Mahasiswa mampu memahami Keunikan Sistem Parlemen Indonesia dengan baik	1. Mampu menguraikan ciri khas sistem Parlemen Indonesia 2. Mampu membandingkan sitem parlemen Indonesia dengan parlemen negara lain 3. Mampu mendeskripsikan kelemahan dan kekuatan sistema parlemen Indonesia	Kriteria: 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Tatap Maya Diskusi Analisa Kasus 2 X 50		Materi: Sistem Parlemen Indonesia Pustaka: _2005. Format Kelembagaaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta	5%

10	Mahasiswa mampu memahami Keunikan Sistem Parlemen Indonesia dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mampu menguraikan ciri khas sistem Parlemen Indonesia dengan baik 2.Mampu membandingkan sitem parlemen Indonesia dengan parlemen negara lain dengan tepat 3.Mampu mendeskripsikan kelemahan dan kekuatan sistema parlemen Indonesia dengan baik 	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Tatap MayaDiskusidan Analisis Fakta 2 X 50		Materi: Sistem Parlemen Indonesia Pustaka: Moentiro, Josef <i>M.2002.Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945.Pustaka Yustisia : Jakarta</i>	5%
11	Mahasiswa mampu menguraikan tugas, wewenang, akuntabilitas lembaga-lembaga negara dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mampu mendeskripsikan tugas dan wewenang lembaga negara dan proses pertanggungjawaban dengan baik 2.Mampu menjelaskan penguatan lembaga-lembaga negara dan lembaga negara bantu dengan baik 	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1.Bagus 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Tatap MayaDiskusiPenguatan Materi Analisis Fakta 2 X 50		Materi: Lembaga Negara Dan Wewenangnya Pustaka: Moentiro, Josef <i>M.2002.Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945.Pustaka Yustisia : Jakarta</i>	5%

12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai persoalan Hukum Tata Negara di Indonesia dengan baik	<p>1.Mampu menjelaskan Hukum Tata Negara dan masyarakat Indonesia dengan baik</p> <p>2.Mampu menganalisis Hukum Tata Negara sebagai transformasi masyarakat Indonesia dengan baik</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Sedang 3.Buruk</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Tatap MayaDiskusi Analisis Fakta dan Masalah 2 X 50	<p>Materi: Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia</p> <p>Pustaka: Assiddiqie, Jimly. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Press : Jakarta Assiddiqie, Jimly, 2005. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press : Yogyakarta Erwin Chemerinsky. 2011. Constitutional Law, Principles and Policies, 4 th Edition. Aspen Publisher : USA Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada : Jakaarta Joeniarto. 1986. Sejarah Ketata Negaraan Republik Indonesia. Jakarta : Bhina Aksara Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Pusat Studi Hukum UI : Jakarta Majda El Mujtad. 2005. Hak Asas Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana : Jakarta Moentiro, Josef M. 2002. Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 . Pustaka Yustisia : Jakarta MPR RI. 2002 . Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal RI : Jakarta Vile. M.J.C. 1990. Constitutionalism and the Sparation of Power . 1995. Tompson, Brian. 1997. Textbook on Constitutional and Administration Law . Edisi ke-3. Blackstone Press Ltd : London Undang Undang tentang MD3. Sekretariat Negara : Jakarta</p>	5%
13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai persoalan Hukum Tata Negara di Indonesia dengan baik	<p>1.Mampu menjelaskan Hukum Tata Negara dan masyarakat Indonesia dengan baik</p> <p>2.Mampu menganalisis Hukum Tata Negara sebagai transformasi masyarakat Indonesia</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Sedang 3.Buruk</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Tatap MayaDiskusi Analisis Fakta 2 X 50	<p>Materi: Ketatanegaraan Indonesia</p> <p>Pustaka: Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Tata Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta</p>	5%

14	Mahasiswa mampu menganalisis persoalan Hukum Tata Negara di Indonesia secara struktur, substansi dan budaya Hukum Tata Negara masyarakat serta pembangunan Hukum Tata Negara Indonesia dengan baik	1.Mampu mendalami persoalan Hukum Tata Negara di masyarakat dengan baik 2.Mampu menganalisis Hukum Tata Negara dari teori Lawrance Friedman dengan baik 3.Mampu menganalisis pembangunan Hukum Tata Negara di Indonesia dengan baik	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Tatap Maya Diskusi Analisis Fakta 2 X 50		Materi: Indonesia dan tatanegaranya Pustaka: <i>Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara UI : Jakarta</i>	5%
15	Mahasiswa mampu menganalisis keunikan sistem Hukum Tata Negara berdasarkan Pancasila dengan baik	1.Mampu menjelaskan konsep Sistem Hukum Tata Negara Pancasila dengan baik 2.Mampu menganalisis kekuatan sistem Hukum Tata Negara Pancasila dengan baik 3.Mampu menganalisis pembangunan Hukum Tata Negara Pancasila dengan baik	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Tatap Maya Diskusi Analisis Fakta 2 X 50		Materi: Lembaga negara dan Amandemen Pustaka: <i>Moentiro, Josef M.2002.Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945.Pustaka Yustisia : Jakarta</i>	5%
16	UAS	UAS	Kriteria: UAS Bentuk Penilaian : Tes	UAS 2 X 50		Materi: Semua sub materi HTN Pustaka: <i>Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Tata Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta</i>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	55%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	15%
3.	Tes	30%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S1
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan



Dr. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0020027505

UPM Program Studi S1 Pendidikan
Pancasila Dan Kewarganegaraan



Dr. Wahyudi, S.Pd., M.Si. (Han).
NIDN 0023049109

File PDF ini digenerate pada tanggal 7 April 2025 Jam 21:39 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

